SANTINA
JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
E-ISSN : 3090-8868
Vol. 1 No. 1 (JUNI - 2025)

KINERJA KORPS BRIMOB DALAM PENANGGULANGAN AKSI HURU HARA DAN UNJUK RASA DI WILAYAH KOTA PALU

Agung[1*], Juemi[2], Rizmala Nadiah Borahima[3]
[1,2,3]Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:
21-05-2025

Disetujui:
24-05-2025

Dipublikasi:
26-06-2025

Kata Kunci:
Kinerja Brimob; Penanggulangan Huru Hara; Demonstrasi; Kepemimpinan; Kota Palu; Keamanan Publik

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Korps Brigade Mobil (Brimob) dalam penanggulangan aksi huru hara dan unjuk rasa di wilayah Kota Palu. Fokus kajian diarahkan pada lima indikator utama kinerja, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Brimob dalam aspek pelatihan, tanggung jawab, dan kepemimpinan dinilai cukup baik oleh responden. Namun, masih terdapat kelemahan dalam aspek kualitas layanan di lapangan, dokumentasi jumlah aksi demonstrasi, dan ketepatan waktu dalam pemulihan keadaan normal pasca-aksi. Faktor penghambat kinerja antara lain adalah kondisi lapangan yang tidak kondusif, kurangnya pencatatan yang sistematis, serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap hasil penanganan aksi. Sementara itu, faktor pendukung mencakup semangat tanggung jawab anggota serta gaya kepemimpinan yang efektif. Dengan demikian, diperlukan strategi peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan sistem dokumentasi, serta pendekatan yang lebih humanis dalam pengendalian massa untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap institusi Brimob.

PENDAHULUAN

Menyampaikan pendapat merupakan salah satu bentuk eksistensi dan ekspresi kebebasan individu yang diakui secara universal. Oleh karena itu, hampir seluruh konstitusi negara di dunia menetapkan kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental warga negara. Salah satu bentuk nyata kebebasan ini adalah penyampaian pendapat di muka umum melalui unjuk rasa atau demonstrasi. Demonstrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berdemokrasi, termasuk di Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun demikian, setiap bentuk penyampaian pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Di Indonesia, demonstrasi kerap dikaitkan dengan mahasiswa sebagai kelompok sosial yang aktif menyuarakan aspirasi. Meski demikian, aksi unjuk rasa juga sering dilakukan oleh elemen masyarakat lainnya seperti organisasi kemasyarakatan atau serikat buruh. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demonstrasi adalah pernyataan protes yang disampaikan secara massal di ruang publik. Aksi ini menjadi bagian dari hak asasi manusia, dan negara berkewajiban melindungi hak tersebut. Oleh karenanya, kehadiran negara dalam bentuk pengamanan oleh aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menjaga agar aksi berjalan tertib, damai, dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi peserta maupun masyarakat luas.

Namun, pada praktiknya, tidak jarang ditemukan insiden penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam menangani aksi demonstrasi, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau

***Korespondensi**
Agung
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia
e-mail: agung94031119@gmail.com

E-ISSN : 3090-8868
SANTINA
JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Vol. 1 No. 1 (JUNI - 2025)

luka-luka. Padahal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka, Polri — termasuk Korps Brimob sebagai satuan elite — memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan perannya secara profesional dan proporsional dalam menghadapi situasi sosial yang rawan seperti demonstrasi.

Korps Brimob memiliki lima kemampuan inti yaitu Penjinakan Bom (Jibom), Reserse Mobil (Resmob), Perlawanan Teror (Wanteror), Search and Rescue (SAR), serta Penanggulangan Huru Hara (PHH). Dalam konteks demonstrasi, kemampuan PHH menjadi sangat krusial. Brimob harus mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam berbagai kondisi, baik saat aksi berlangsung maupun dalam situasi antisipatif dan pascakejadian. Pelaksanaan tugas ini dituntut tidak hanya dari segi ketangguhan fisik, tetapi juga kecermatan dalam bersikap, menjunjung hak asasi manusia, dan menjaga keseimbangan antara ketegasan serta humanisme.

Beberapa penelitian terdahulu telah menelaah peran dan tantangan Brimob dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Syahrialdi (2016) dalam penelitiannya pada Brimob Sumatera Utara menemukan bahwa peran Brimob belum berjalan optimal, antara lain karena pengunjuk rasa tidak melaporkan rencana aksi secara resmi, serta adanya pelanggaran prosedur oleh personel Brimob sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sementara itu, Wibisono (2024) meneliti penanganan unjuk rasa di wilayah Ekswil Pekalongan dan menemukan bahwa pelaksanaan pengamanan belum berjalan lancar karena kerap terjadi tindakan anarkis. Ia menggunakan metode wawancara dan observasi untuk menjelaskan proses dan interaksi yang terjadi selama aksi. Akbar (2019) dalam penelitiannya di Polda Lampung mengidentifikasi bahwa penanggulangan unjuk rasa dilakukan secara penal dan non-penal, dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris berbasis kualitatif. Upaya non-penal dilakukan melalui pendekatan persuasif dan negosiasi, sementara upaya penal mencakup penggunaan kekuatan sesuai peraturan.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa berbagai tantangan dihadapi oleh satuan Brimob di berbagai wilayah dalam hal penegakan hukum dan pengendalian massa, baik dari aspek prosedural, teknis, maupun pendekatan. Persamaan dari ketiga studi ini adalah fokus pada peran Brimob dalam menangani demonstrasi, namun masing-masing menggunakan pendekatan dan lokasi berbeda. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi kinerja Korps Brimob dalam penanggulangan aksi huru hara di Kota Palu dengan pendekatan survei, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran empiris yang lebih kontekstual dan mendalam.

Hasil observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa kinerja Brimob di Kota Palu dalam menghadapi aksi unjuk rasa belum sepenuhnya optimal. Keterlambatan dalam respons akibat kurangnya kesiapan transportasi, lemahnya pengendalian terhadap provokator, serta kurangnya keterampilan teknis anggota menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan. Selain itu, motivasi kerja dan arahan pimpinan juga menjadi elemen penting yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara menyeluruh kinerja Brimob dalam penanggulangan aksi huru hara dan unjuk rasa, sebagai kontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia di wilayah Kota Palu..

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja seseorang dalam suatu organisasi yang dapat diukur dari segi kualitas, kuantitas, serta tanggung jawab atas tugas yang diberikan (Sastrohadiwiryo, 2002). Ranupandojo & Husnan (2011) menekankan bahwa kualitas kerja dinilai berdasarkan ketelitian, keterampilan, keberhasilan, serta keandalan dalam menjalankan instruksi dan inisiatif. Sementara Hersey dan Blanchard (dalam Rivai, 2005) menyebutkan bahwa kinerja merupakan fungsi dari

***Korespondensi**
Agung
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia
e-mail: agung94031119@gmail.com

E-ISSN : 3090-8868
SANTINA
JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Vol. 1 No. 1 (JUNI - 2025)

motivasi dan kemampuan, yang berarti penyelesaian pekerjaan memerlukan kemauan serta kecakapan yang memadai. Mangkunegara (2005) mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi kinerja, yaitu: (1) faktor individual seperti keahlian dan latar belakang, (2) faktor psikologis seperti motivasi dan sikap, dan (3) faktor organisasi seperti kepemimpinan, struktur kerja, dan sumber daya. Sementara itu, menurut Bernardin dan Russell (dalam Keban, 2008), parameter kinerja meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, penghematan biaya, kemandirian, dan kerja sama. Hasibuan (2005) menyebutkan aspek-aspek penilaian kinerja antara lain: kesetiaan, kejujuran, disiplin, kreativitas, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Sedangkan menurut Sastrohadiwiryo (2002), kinerja juga dinilai dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Motivasi turut menjadi penentu kinerja, menurut Saydam (2000), pemberian motivasi bertujuan meningkatkan semangat kerja, loyalitas, produktivitas, dan tanggung jawab pegawai. Indikator motivasi kinerja mencakup kepuasan kerja, tanggung jawab, pencapaian target, kejelasan tujuan, timbal balik, serta prestasi kerja yang dicapai.

Korps Brimob dan Perannya dalam Penanggulangan Unjuk Rasa

Korps Brigade Mobil (Brimob) adalah satuan elit Kepolisian Republik Indonesia yang dibentuk pada 14 November 1945. Sebagai satuan paramiliter, Brimob memiliki lima kemampuan utama: penjinakan bom (Jibom), reserse mobil (Resmob), perlawanan teror (Wanteror), SAR, dan penanggulangan huru hara (PHH) (Chumaisa, 2006). Dalam konteks unjuk rasa, Brimob berperan sebagai lapis terakhir untuk menangani eskalasi kerusuhan dan anarkisme. Peningkatan simpati masyarakat terhadap Brimob dapat dilakukan melalui tiga aspek pembenahan internal: penampilan kesatuan, konsistensi dalam menjalankan tugas, dan kesiapan operasional. Penampilan operasional yang baik mencakup kehadiran cepat di lokasi, kesiapan perlengkapan, kemampuan personel, serta tindakan yang tidak melanggar hak asasi manusia. Brimob juga harus menunjukkan profesionalisme melalui pasukan yang terkoordinasi, tanggap terhadap kondisi darurat, serta terlatih dalam menggunakan teknologi dan perlengkapan. Tindakan Brimob dalam situasi kerusuhan haruslah terukur, sah secara hukum, dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Brimob juga diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam semboyan "Satya Haprabu", yang menjadi dasar moral dan etika dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan moral untuk menjaga integritas dan keberlanjutan peran Brimob sebagai penjaga keamanan negara yang profesional dan humanis.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam kinerja Korps Brimob dalam penanggulangan aksi huru hara dan unjuk rasa di wilayah Kota Palu. Fokus penelitian diarahkan pada lima indikator utama, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika pelaksanaan tugas Brimob di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kinerja satuan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri dari masyarakat umum dan personel Brimob, serta melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Danton (Komandan Pleton), Danki (Komandan Kompi), dan Danru (Komandan Regu) Brimob. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan kegiatan satuan, serta peraturan yang relevan, seperti Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanggulangan Keadaan Darurat.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi langsung terhadap pelaksanaan tugas pengamanan, wawancara semi-terstruktur, penyebaran kuesioner tertutup, serta studi dokumentasi terhadap data arsip dan laporan resmi satuan. Analisis data dilakukan

***Korespondensi**
Agung
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia
e-mail: agung94031119@gmail.com

SANTINA
e-ISSN: 3090 - 8868

E-ISSN : 3090-8868
SANTINA
JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Vol. 1 No. 1 (JUNI - 2025)

melalui tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setiap informasi yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, lalu dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta peluang perbaikan dalam pelaksanaan tugas Brimob. Untuk menjaga validitas dan keandalan hasil penelitian, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Markas Komando Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah, Kota Palu, selama periode Januari hingga April 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Korps Brigade Mobil (Brimob) dalam menangani aksi huru hara dan unjuk rasa di wilayah Kota Palu selama lima tahun terakhir. Sebagai satuan elit Kepolisian Negara Republik Indonesia, Brimob memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan melalui pendekatan profesional, terlatih, dan terukur. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis data primer yang dikumpulkan dari responden serta wawancara mendalam dengan personel Brimob, penelitian ini menilai kinerja Brimob berdasarkan lima indikator utama: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kinerja Brimob dalam menghadapi dinamika sosial yang terjadi selama aksi massa, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi pelaksanaan tugas di lapangan.

Tabel 1
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Kinerja Korps Brimob

No.	Kualitas	Kinerja	Tanggapan Responden
1	Pengamanan Dan Perindungan	Brimob berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi demonstrasi, sehingga meminimalkan resiko kekerasan dan kerusakan property	Cukup Baik
2	Pelatihan Dan Pendidikan	Personel brimob mendapatkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme	Baik
3	Kepuasan Masyarakat	Kualitas kinerja brimob juga dapat diukur dari kepuasan masyarakat terhadap penanganan aksi unjuk rasa	Kurang Baik

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2024

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas kinerja Korps Brimob dalam penanggulangan aksi huru hara dan unjuk rasa di wilayah Kota Palu dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu: pengamanan dan perlindungan, pelatihan dan pendidikan, serta kepuasan masyarakat.

1. Pengamanan dan Perlindungan

   Sebagian besar responden menilai bahwa kinerja Brimob dalam aspek pengamanan dan perlindungan tergolong cukup baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Hendra selaku Danton (Komandan Pleton) Brimob, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas pengamanan oleh Korps Brimob berjalan cukup optimal dalam menjaga ketertiban selama aksi unjuk rasa. Menurutnya, Brimob bertanggung jawab untuk mencegah, menertibkan, dan mengamankan demonstrasi yang tidak terkendali. Dalam pelaksanaan tugas, Brimob mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara

***Korespondensi**
Agung
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia
e-mail: agung94031119@gmail.com

E-ISSN : 3090-8868
SANTINA
JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Vol. 1 No. 1 (JUNI - 2025)

Penanggulangan Keadaan Darurat. Penindakan terhadap demonstrasi yang melanggar aturan dilaksanakan secara profesional, etis, dan proporsional, dengan mempertimbangkan dinamika lapangan.

2. Pelatihan dan Pendidikan

   Responden menilai bahwa pelatihan dan pendidikan bagi personel Brimob di wilayah Kota Palu telah dilaksanakan dengan baik. Bapak Hendra menyatakan bahwa peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan menjadi faktor penting dalam menunjang profesionalisme anggota Brimob. Adapun materi pelatihan meliputi pemahaman Undang-Undang tentang Pengendalian Huru Hara (PHH), pengenalan alat-alat PHH, gerakan dasar, hingga formasi lintas ganti. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Ishakg selaku Danki (Komandan Kompi), yang menegaskan bahwa pelatihan bertujuan untuk mengasah kemampuan personel dalam mengantisipasi potensi ancaman, khususnya terkait aksi unjuk rasa yang berpotensi berkembang menjadi huru hara.

3. Kepuasan Masyarakat

   Berbeda dengan dua aspek sebelumnya, indikator kepuasan masyarakat terhadap kinerja Brimob dinilai oleh responden sebagai kurang baik. Hasil wawancara dengan Bapak Hendra mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan aksi demonstrasi oleh Brimob seringkali belum mampu memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat. Meskipun telah dilakukan pendekatan persuasif seperti dialog dengan koordinator aksi dan imbauan untuk tertib, kenyataannya di lapangan kerap terjadi kericuhan. Hal ini umumnya disebabkan oleh keberadaan provokator serta pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menunggangi aksi. Situasi tersebut menyebabkan bentrokan yang berdampak pada ketertiban umum. Tindakan huru hara yang dilakukan massa demonstran juga termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang diancam pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas kinerja Korps Brimob di Kota Palu dalam aspek pengamanan dan pendidikan sudah tergolong baik, namun masih perlu peningkatan terutama dalam hal membangun persepsi positif dan kepuasan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas komunikasi publik dan pendekatan humanis dalam menangani demonstrasi menjadi salah satu strategi penting yang perlu dipertimbangkan.

Tabel 2
Tanggapan Responden Tentang Kuantitas Pengamanan Aksi Oleh Korps Brimob

No.	Aksi Demo	Waktu	Tanggapan Responden	Jumlah
1	Menolak revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pembrantasan Korupsi, RUU Pertahanan, Kenaikan Uang Kuliah Tunggal, dan RUU KUHP	2019	Ricuh	1 Aksi
2	Menolak Omnimbus Law, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja	2020	Ricuh	1 Aksi
3	Mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	2024	Ricuh	1 Aksi

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2024

Berdasarkan hasil penelitian, tercatat bahwa terdapat tiga aksi demonstrasi besar yang terjadi di wilayah Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019, 2020, dan 2024. Aksi-aksi tersebut meliputi: (1) penolakan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Pertahanan, kenaikan Uang Kuliah Tunggal, dan RUU

***Korespondensi**
Agung
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia
e-mail: agung94031119@gmail.com

SANTINA
JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
E-ISSN : 3090-8868
Vol. 1 No. 1 (JUNI - 2025)

KUHP pada tahun 2019; (2) penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada tahun 2020; serta (3) aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024. Menurut tanggapan para responden, seluruh demonstrasi tersebut berlangsung dalam kondisi ricuh, yang mencerminkan bahwa kuantitas kinerja Korps Brimob, terutama dalam hal pengendalian situasi dan pencegahan eskalasi konflik, masih perlu ditingkatkan.

Wawancara dengan salah satu responden, yaitu Bapak Markus selaku Komandan Regu (Danru), mengungkapkan bahwa pencatatan jumlah aksi demo yang dilakukan secara manual selama ini masih belum tertata dengan baik dan kurang rapi. Hal ini dinilai sebagai kekurangan dalam hal dokumentasi dan pelaporan yang menjadi bagian penting dari evaluasi kinerja. Menurutnya, pengelolaan data dan analisis terhadap tren demonstrasi seharusnya menjadi tugas rutin yang dilaksanakan secara sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan peningkatan kesiapsiagaan satuan.

Lebih lanjut, Bapak Markus menjelaskan bahwa tingginya kecenderungan kericuhan dalam setiap aksi menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam strategi penanggulangan. Ia menekankan perlunya pelaksanaan empat tahapan tindakan yang meliputi: tindakan preventif (meliputi pemantauan intelijen, koordinasi lintas institusi, penempatan pasukan, dan kesiapan peralatan), tindakan operasional (seperti pengarahan personel, pembatasan akses, penggunaan perlengkapan pengendalian massa, dan evakuasi korban), tindakan strategis (termasuk negosiasi dengan koordinator aksi, komunikasi publik, dan pengawasan situasi secara real time), serta tindakan pasca-insiden (berupa evaluasi, bantuan bagi korban, dan pembaruan strategi pengamanan).

Dengan memperhatikan temuan data dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kuantitas kinerja Korps Brimob dalam penanggulangan aksi huru hara dan unjuk rasa di wilayah Kota Palu masih belum optimal. Perlu adanya perbaikan dalam sistem pencatatan data, peningkatan kualitas evaluasi tahunan, serta implementasi strategi yang lebih terstruktur guna meminimalkan potensi kerusuhan dan meningkatkan responsifitas dalam menghadapi eskalasi konflik sosial.

Tabel 3
Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Waktu Kinerja Korps Brimob

No.	Ketepatan Waktu	Tanggapan Responden	Keterangan
1	Waktu Respon Terhadap Insiden	(> 15 Menit)	Cukup Baik
2	Evakuasi Korban	(> 30 Menit)	Baik
3	Waktu Penyelesaian Operasi	(> 2 Jam)	Baik
4	Waktu Pemulihan Keadaan Normal	(> 4 Jam)	Kurang Baik
5	Tingkat Kepuasan Masyarakat	(> 80%)	Baik

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2024

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu respon Brimob terhadap berbagai tahapan penanggulangan aksi huru hara dan unjuk rasa di wilayah Kota Palu pada umumnya telah menunjukkan hasil yang baik. Responden memberikan penilaian cukup baik terhadap ketepatan waktu respon insiden dengan waktu lebih dari 15 menit, serta penilaian baik terhadap ketepatan waktu evakuasi korban yang dilakukan dalam waktu lebih dari 30 menit. Selain itu, ketepatan waktu penyelesaian operasi yang dilakukan dalam kurun waktu lebih dari dua jam juga dinilai baik oleh responden. Namun demikian, terdapat kelemahan pada aspek ketepatan waktu dalam pemulihan keadaan normal, di mana responden memberikan penilaian kurang baik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Brimob secara umum cukup tinggi, yakni sebesar 80% dalam kategori baik. Temuan ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Brimob, Bapak Anthong, yang menyatakan bahwa kinerja Brimob dalam aspek waktu sudah baik, kecuali pada tahap pemulihan keadaan normal. Ia menjelaskan

***Korespondensi**
Agung
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia
e-mail: agung94031119@gmail.com

SANTINA
JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
E-ISSN : 3090-8868
Vol. 1 No. 1 (JUNI - 2025)

bahwa hambatan utama dalam proses pemulihan ini disebabkan oleh situasi demonstrasi yang berlangsung ricuh akibat ketidakdisiplinan massa dan kehadiran provokator-provokator yang memicu kekacauan. Kondisi tersebut menyebabkan situasi menjadi tidak kondusif dan memperpanjang durasi demonstrasi hingga berlangsung berhari-hari. (Wawancara, Rabu, 01 Januari 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memberikan apresiasi terhadap kinerja Brimob, khususnya dalam hal ketepatan waktu dalam menangani insiden huru hara dan unjuk rasa. Namun, peneliti juga menekankan perlunya peningkatan pada aspek pemulihan keadaan normal agar dapat mempercepat terciptanya situasi yang kembali kondusif dan meningkatkan kepuasan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 4
Tanggapan Responden Tentang Tanggung Jawab Pengamanan Aksi Oleh Korps Brimob

No.	Indikator Tanggung Jawab	Tanggapan Responden
1	Penilaian Pekerjaan	Sangat Baik
2	Kerja Sama Tim	Cukup Baik
3	Tindak Perbaikan	Baik

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2024

Hasil penelitian berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian pada kategori "sangat baik", "cukup baik", dan "baik" terhadap tiga indikator utama, yaitu: tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, kerja sama tim, dan tindak perbaikan. Ketiga indikator tersebut mencerminkan kinerja Korps Brimob dalam penanggulangan aksi huru hara dan unjuk rasa di wilayah Kota Palu, khususnya di lingkungan Kantor Mako Sat Brimob Polda Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil tersebut, yang juga diperkuat oleh wawancara dengan responden, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab oleh anggota Korps Brimob di Kantor Mako Sat Brimob Polda Sulteng telah menunjukkan kinerja yang baik, khususnya pada aspek tanggung jawab individu maupun tim dalam menjalankan tugas penanggulangan aksi massa.

Tabel 5
Tanggapan Responden Tentang Kepemimpinan Kinerja Korps Brimob

No.	Indikator Kepemimpinan	Tanggapan Responden
1	Pengambilan keputusan cepat dan tepat	Baik
2	Komunikasi efektif dengan tim dan masyarakat	Baik
3	Menggerakkan dan memotivasi personil brimob	Sangat Baik

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2024

Hasil penelitian berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian "baik" terhadap kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta komunikasi yang efektif dengan tim dan masyarakat, sebagai bagian dari indikator kepemimpinan Brimob. Selain itu, terdapat responden yang memberikan penilaian "sangat baik" pada aspek kepemimpinan dalam hal menggerakkan dan memotivasi personel Brimob. Temuan ini membuktikan bahwa kepemimpinan dalam kinerja Korps Brimob, khususnya dalam konteks penanggulangan aksi huru hara dan unjuk rasa di wilayah Kota Palu, telah berjalan dengan baik dan efektif.

Brigade Mobil (Brimob) merupakan salah satu satuan elit dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Brimob memiliki lima kemampuan dasar yang menjadi keunggulan

***Korespondensi**
Agung
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia
e-mail: agung94031119@gmail.com

SANTINA
JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
E-ISSN : 3090-8868
Vol. 1 No. 1 (JUNI - 2025)

operasionalnya, yaitu Penjinakan Bom (Jibom), Reserse Mobil (Resmob), Perlawanan Teror (Wanteror), Search and Rescue (SAR), dan Penanggulangan Huru Hara (PHH). Dalam pelaksanaan tugasnya, Brimob memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi pokok kepolisian, yaitu penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Kinerja ini dituntut untuk tetap optimal dalam segala kondisi, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya suatu peristiwa.

Semangat kerja yang tinggi dari personel Korps Brimob menjadi modal penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa indikator kinerja seperti kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, tanggung jawab, dan kepemimpinan, masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diperhatikan. Adapun hasil pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

   Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi kinerja Brimob dalam penanggulangan aksi huru hara dan unjuk rasa di wilayah Kota Palu, antara lain:

   a. Indikator Kualitas: Masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas yang mengindikasikan belum optimalnya mutu layanan dan hasil kerja di lapangan.
   b. Indikator Kuantitas: Pengelolaan data terkait jumlah aksi demonstrasi yang terjadi setiap tahun masih dinilai kurang tertib dan belum terdokumentasi dengan baik.
   c. Indikator Ketepatan Waktu: Penyelesaian aksi demonstrasi di lapangan sering kali memakan waktu yang lama dan berlarut-larut, bahkan hingga berhari-hari, karena situasi yang tidak kondusif dan adanya unsur provokatif dari massa aksi.

2. Faktor Pendukung

   Meskipun terdapat beberapa kendala, pelaksanaan tugas Brimob juga ditopang oleh sejumlah faktor pendukung yang signifikan, antara lain:

   a. Indikator Tanggung Jawab: Terlihat adanya semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari anggota Brimob dalam menjalankan setiap tugas yang diemban, terutama dalam menghadapi situasi darurat.
   b. Indikator Kepemimpinan: Gaya kepemimpinan di lingkungan Mako Satbrimob Polda Sulawesi Tengah dinilai cukup efektif, ditandai dengan kemampuan memimpin yang cepat tanggap, mampu menggerakkan, memotivasi, serta berkomunikasi secara efektif dengan anggota maupun masyarakat.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat dan pendukung di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kinerja Brimob di wilayah Kota Palu dalam penanggulangan aksi huru hara dan unjuk rasa secara umum sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih diperlukan upaya perbaikan, khususnya pada aspek kualitas kerja, sistem dokumentasi, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan konflik sosial.

KESIMPULAN

Secara umum, kinerja Korps Brimob di wilayah Kota Palu dalam menangani aksi huru hara dan unjuk rasa menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama pada aspek pelatihan dan pendidikan, tanggung jawab, serta kepemimpinan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian, khususnya pada aspek kualitas pelayanan, sistem dokumentasi kuantitas aksi, dan ketepatan waktu dalam memulihkan kondisi pasca-demonstrasi. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya dokumentasi sistematis, lamanya waktu pemulihan keadaan normal akibat situasi tidak kondusif, serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat. Di sisi lain, faktor pendukung yang menonjol adalah semangat tanggung jawab personel dan efektivitas kepemimpinan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas personel, pembenahan sistem dokumentasi, dan pendekatan yang lebih humanis dalam

***Korespondensi**
Agung
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia
e-mail: agung94031119@gmail.com

SANTINA
e-ISSN: 3090 - 8868

pengendalian massa guna meningkatkan kualitas kinerja secara menyeluruh dan membangun persepsi positif masyarakat terhadap institusi Brimob.

REFERENSI

Akbar, L. (2019). Upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam Penanggulangan Unjuk Rasa yang Disertai dengan Kekerasan. *Tesis*. Universitas Lampung.

Chumaisa, S. (2006). *Perpolisian Masyarakat*. Semeru Polda Jatim.

Hasibuan, S. P. M. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.

Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mangkunegara, A. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya.

Ranupandojo, H., & Husnan, S. (2011). *Manajemen Personalia*. BPFE-Yogyakarta.

Rivai, V. (2005). *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahan*. Raja Grafindo.

Sastrohadiwiryo, S. (2002). *Manajemen Tenaga Kerja*. Bumi Aksara

Saydam, G. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu pendekatan Mikro*. Djambaran.

Syahrialdi, S. (2016). Peranan Brigade Mobil dalam Penanggulangan Aksi Demonstrassi Massa (Studi pada Brimob Sumatera Utara). *Tesis*. Universitas Medan Area.

Wibisono, R. (2024). Peran Brimob dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Ekswil Pekalongan. *Tesis*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

SANTINA
e-ISSN: 3090 - 8868

***Korespondensi**
Agung
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia
e-mail: agung94031119@gmail.com